

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang merupakan bagian dari provinsi Banten. Berada di bagian timur Provinsi Banten, Kota Tangerang terdiri atas 13 kecamatan yang dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan. Secara geografis letak kota Tangerang berbatasan langsung dengan ibukota menjadikan beberapa kecamatan yang berbatasan langsung menjadi pusat segala kegiatan baik pemerintah, ekonomi, industri dan perdagangan, politik, sosial, budaya. Hal tersebut mendasari pemerintah memandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara khusus. Maka pada tanggal 28 februari 1981 tentang pembentukan kota administratif Tangerang.

Bedasarkan data yang di dapat dari DPRD Kota Tangerang dalam 12 tahun terakhir, Kota Administratif Tangerang kembali menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat disegala bidang, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Perkembangan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota yang peruntukannya sebagai daerah industri, perumahan, perdagangan, dan jasa dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dalam hal administratif, menjadi salah satu alasan pentingnya peninjauan desain untuk bangunan administrasi daerah.

Kantor merupakan sebuah unit organisasi yang terdiri atas tempat, staff personel dan operasi tata keusahaan untuk membantu pimpinan (Prajudi Atmosudirjo, 1982). Kantor memiliki klasifikasi yang bermacam-macam salah satunya yaitu kantor pemerintahan yang merupakan tempat dilaksanakannya berbagai kegiatan pemerintahan baik administratif pemerintahan itu sendiri maupun sebagai pusat pelayanan masyarakat. Di kota Tangerang, terdapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang merupakan kantor Kementrian

Pekerjaan Umum dari pemerintah pusat. Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang adalah bagian dari pemerintahan kota yang mempunyai peran untuk membantu walikota melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum, perencanaan wilayah, serta dalam pertanahan Kantor ini menambah warna pada pelayanan publik. Guna mencapai tujuan pekerjaan pemerintahan yang berkualitas, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan sarana yang memadai.

Untuk memastikan bahwa kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sarana dan prasarana kantor yang sesuai, harus disesuaikan dengan standar. Persyaratan fisik kantor, prasarana, dan penyesuaian dengan tata ruang kota diperhatikan dalam SK No. 29/PRT/M/2006 dari instansi pemerintah. Persyaratan ini sesuai dengan persyaratan umum gedung. Selain itu, studi banding dilakukan antara Kantor Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Tangerang Selatan, Kantor Walikota Tangerang Selatan, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, kuesioner, dan studi lapangan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, ditemukan bahwa beberapa kekurangan termasuk pencahayaan yang tidak ideal sehingga mengganggu kenyamanan pegawai. Area sirkulasi gerak pegawai yang sempit diakibatkan oleh penataan *furniture* yang tidak sesuai ergonomi sehingga, menyulitkan pegawai dalam bergerak dan menemukan dokumen yang dibutuhkan. Adapun terdapat juga kepentingan peninjauan ulang dalam aspek fasilitas ruang-ruang yang ada di kantor. Hal-hal tersebut menimbulkan efek terhadap psikologis bagi pengguna ruangan, oleh karena itu diperlukan perancangan ulang.

Psikologi ruang merupakan salah satu faktor penting dalam segi kenyamanan dan dapat mempengaruhi efektivitas dan produktivitas dalam bekerja menurut Chao, dkk (2003) lingkungan yang tidak nyaman dan sehat dapat menurunkan tingkat produktivitas maupun moral pegawai. Pengguna ruang menerima dan memahami ruang dan bentuk dalam tiga faktor yang berbeda tetapi berhubungan satu sama

lainnya, yaitu secara fisik, emosional dan intelektual (Amelia, dkk 2022).

Oleh karena itu, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Tangerang perlu di rancang kembali untuk mempertahankan kinerja pegawai dengan penataan tata letak furniture dan layout kantor agar tetap menjaga kolaborasi dan efektivitas dalam bekerja.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Dari hasil penelitian dan survey terdapat beberapa masalah yang ditemukan, yaitu:

1.2.1 Permasalahan Utama

- Penataan ruang secara umum tidak sesuai dengan alur aktivitas pekerjaan yang mengharuskan kolaborasi antar pegawai sehingga, mempengaruhi kinerja pegawai. Adapun Pencahayaan yang kurang maksimal sehingga, mengganggu efektivitas kerja pegawai.

1.2.1 Fasilitas

- Ruang yang ada pada area kantor dinilai kurang memadai dari segi ergonominya. Hal ini dapat terlihat dari beberapa area contohnya seperti, fasilitas ruang kerja yang tidak sesuai ergonomi dikarenakan, peletakan *furniture* yang tidak optimal. Adapun fasilitas pendukung seperti mushola dan *pantry* yang tidak memadai.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya maka menghasilkan rumusan masalah yang terdapat pada perancangan kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana menciptakan ruang yang sesuai dengan alur aktivitas pegawai sehingga dapat mendukung kolaborasi antar pegawai?
- b. Bagaimana merancang kantor dengan standarisasi pencahayaan agar tidak mengganggu efektivitas kerja pegawai?
- c. Bagaimana merancang kantor dengan memperhatikan penempatan furniture yang

baik sehingga tidak mengganggu sirkulasi pegawai dan memudahkan pegawai untuk menemukan dokumen?

- d. Bagaimana menciptakan kantor dengan fasilitas pendukung yang lengkap dan memadai?

1.4 Tujuan dan sasaran perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, Perancangan ulang dari kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk menciptakan kantor yang dapat menunjang kebutuhan penggunanya dengan solusi pendekatan psikologi ruang, Untuk menunjang agar kantor ini dapat berfungsi dengan baik, maka interior kantor harus dilakukan perancangan ulang agar dapat mendukung kebutuhan aktivitas yang nyaman dan aman, menerapkan standarisasi kantor pemerintahan, dan standar ergonomi (Haryotedjo, 2023).

Dikarenakan pendekatan ini dapat menciptakan susasana ruang yang efektif dan mendukung kenyamanan pengguna. Selain itu, pengguna juga dipenuhi kebutuhannya dengan menciptakan ruang yang memperhatikan aspek organisasi ruang, fasilitas, dan sirkulasi melalui standar perancangan interior dan pemerintahan.

- a. Mewujudkan perancangan kantor yang dapat mendukung kolaborasi pegawai.
- b. Merancang kantor yang dapat memberikan pencahayaan yang ideal bagi penggunanya.
- c. Merancang kantor sesuai dengan fungsi ruangnya melalui penerapan layout, material, warna, dan furniture.

1.5 Batasan perancangan

Batasan pada perancangan kantor cabang distribusi sebagai berikut:

- Nama proyek : Kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
- Lokasi : Jl. Ks.Tubun, Rt.002/Rw.004 Koang raya,

karawaci

- Luas perancangan Utama : 1093,5 dari 2196 m²
- Batasan ruang Utama : Ruang kepala dinas, ruang meeting, ruang sekretariat, ruang bidang perencanaan teknis, ruang kabid perencanaan teknis, ruang bina marga, ruang kabid bina marga, ruang bidang tata ruang, ruang kabid tata ruang, ruang bidang tata air, ruang kabid tata air, ruang bidang operasi pemeliharaan, ruang kabid operasi pemeliharaan, ruang lobby, ruang tunggu tamu, pantry, musholla.
- Pengguna : Pegawai kantor

1.6 Manfaat perancangan

1.6.1 Manfaat bagi perusahaan terkait

- Manfaat perancangan ini dapat membantu mengembangkan kantor yang dapat menciptakan kolaborasi dan kenyamanan penggunanya.
- Dapat dijadikan penambahan referensi untuk kantor pemerintah yang akan dibuat atau direnovasi selanjutnya sebagai bahan pengembangan dan evaluasi

1.6.2 Manfaat bagi masyarakat atau komunitas

- Masyarakat dapat memanfaatkan perancangan ini sebagai referensi kantor yang menggunakan aspek pendekatan psikologi ruang.

1.6.3 Manfaat bagi keilmuan interior

- Manfaat dari hasil perancangan ini dapat dijadikan sebagai wawasan maupun perkembangan dalam ilmu pengetahuan desain interior dan bidang lain yang masih terkait hubungannya.
- Sebagai referensi tentang perancangan kantor dinas pemerintah khususnya bagi mahasiswa program studi desain interior.

1.7 Metode perancangan

Tahap metode pengumpulan data perancangan ulang kantor dinas pemerintah adalah sebagai berikut:

1.7.1 Tahap pengumpulan data

Metode pengumpulan ini meliputi kegiatan seperti wawancara, observasi, dan studi lapangan. Pada tahap ini juga mengambil data dari buku, jurnal, standar perusahaan, dan peraturan pemerintah untuk melengkapi data-data.

1.7.2 Wawancara

Tahap wawancara dilakukan bersama pihak kantor. Hasil dari wawancara ini digunakan untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan pengguna ruang kantor yang kemudian dianalisis ulang sehingga menyesuaikan standar kantor dan memenuhi kebutuhan penggunanya.

1.7.3 Observasi langsung

Tahap observasi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi kantor dinas pemerintah agar mengetahui kondisi existing dan suasananya. Hasil dari observasi ini untuk mengetahui kondisi existing kantor, mengetahui aktivitas pengguna, mengetahui apakah existing fasilitas sudah memenuhi standar, dan permasalahan-permasalahan lainnya.

1.7.4 Dokumentasi

Tahap dokumentasi berisikan foto dan video kondisi existing kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang. Tahapan ini bertujuan untuk menyampaikan perbandingan desain ruangan yang baik sebelum dan sesudahnya. Tahap ini juga untuk menemukan data tentang masalah dalam objek perancangan.

1.7.5 Studi literatur

Tahap ini untuk menemukan referensi standar perancangan kantor yang baik yaitu melalui buku, jurnal, peraturan pemerintah, dan laporan tugas akhir. Data yang ditemukan beberapa diantaranya adalah jurnal-jurnal tentang psikologi ruang yang baik itu secara teori maupun dalam penerapannya,

standar ruang kantor, dan peraturan pemerintah.

1.7.6 Studi banding

Analisa studi banding dilakukan pada dua kantor dinas pemerintah yang terletak di Tangerang selatan. Tahap ini bermanfaat untuk mengetahui standar perancangan yang baik menurut standar kantor dinas pemerintah

1.7.7 Pendekatan

Tahap ini dilakukan sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan pada area perancangan, untuk menentukan pendekatan ini diperlukan sumber-sumber valid seperti jurnal agar dapat dikembangkan dengan topik-topik pada area perancangan yang lebih spesifik. Pendekatan yang digunakan adalah psikologi ruang dikarenakan pendekatan ini menjawab solusi dari permasalahan utama perancangan.

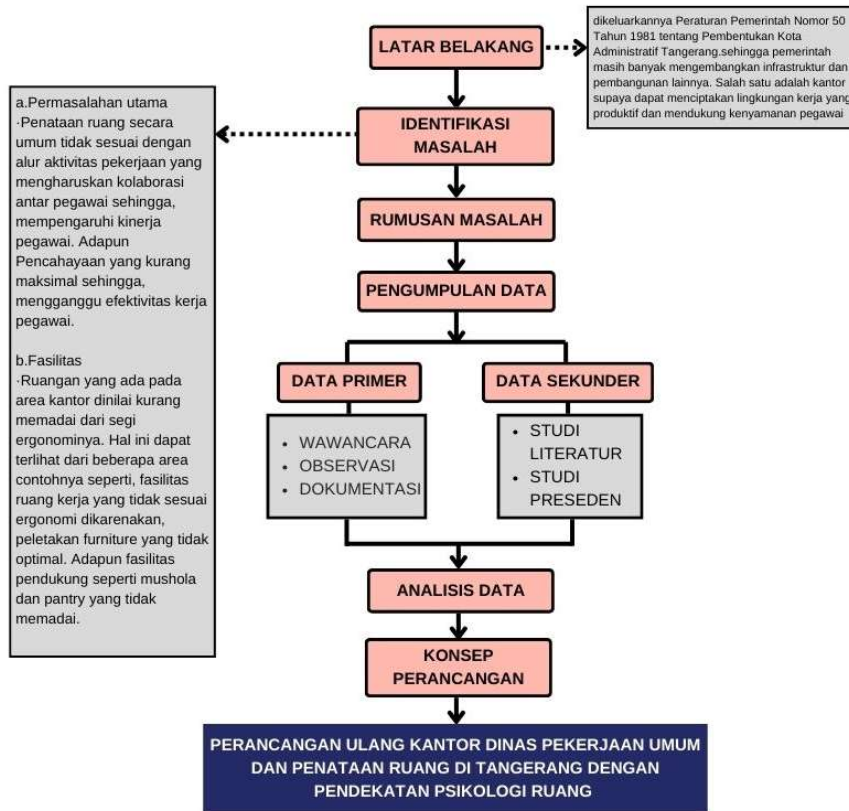
1.7.8 Menentukan Tema dan konsep

Tema merupakan sebuah visi yang akan digunakan dalam perancangan, sedangkan konsep adalah misi yang harus dilakukan agar visi yang ditetapkan tercapai. Tema dari perancangan ini berjudul *Form Follow Function*. Konsep yaitu seperti konsep warna, furniture, penghawaan, pencahayaan, keamanan, bentuk, sirkulasi, dan Gambar kerja. Gambar kerja merupakan gambar acuan untuk merealisasikan ide ke dalam wujud fisik. Gambar kerja yang dibuat adalah *layout, floor plan, ceiling plan*, potongan, tampak, utilitas, detail interior, dan detail furniture.

1.7.9 3D Model

Tahap ini merupakan hasil perancangan yang direalisasikan dalam bentuk tiga dimensi, tahap ini biasanya menggunakan aplikasi sketchup dan render menggunakan aplikasi enscape.

1.8 Kerangka berpikir



1.9 Pembaban Laporan TA

Penulisan proposal ini ditulis melalui sistematika sebagai berikut :

1.9.1 BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran perancangan, batasan perancangan, manfaat dari perancangan, metode perancangan, kerangka berpikir, dan pembahasan dengan sistematika yang berkaitan dengan perancangan interior kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang.

1.9.2 BAB II: KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN

Pada bab kedua berisi teori-teori yang berhubungan dengan perancangan seperti definisi, klasifikasi dan standarisasi, data primer dan data sekunder, serta studi preseden yang berhubungan dengan perancangan kantor dinas pemerintah. Data maupun teori yang sudah didapat dijadikan bahan acuan terhadap perancangan terkait.

1.9.3 BAB III: KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR

Bab ini tentang hasil analisis dari data-data yang sudah didapat pada bab sebelumnya sehingga hasil analisis tersebut dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam perancangan terkait.

1.9.4 BAB IV: KONSEP PERANCANGAN VISUAL DENAH KHUSUS

Penjelasan bab ini berisikan tentang konsep perancangan yang dipilih mulai dari tema dan konsep perancangan seperti konsep visual, pencahayaan, penghawaan, akustik, material, dan keamanan yang nantinya akan diterapkan dalam perancangan.

1.9.5 BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil akhir seluruh proses desain yang juga mencakup solusi berupa saran yang didapatkan dari

permasalahan perancangan.

1.9.6 DAFTAR PUSTAKA

Berisikan sumber-sumber seperti jurnal, buku, standar perancangan, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

1.9.7 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisikan data-data yang berkaitan dengan perancangan seperti dokumentasi, data wawancara, hasil plagiarisme, dan data lainnya.

